

## MEMBANDINGKAN PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP KEMISKINAN DI KAWASAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA SERTA IMPLIKASI KEBIJAKAN

Nilda Nurmala<sup>1</sup>, Manuntun Parulian Hutagaol<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Departemen Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
Email: nurmala@apps.ipb.ac.id

### ABSTRAK

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah pengentasan kemiskinan. Ketersediaan infrastruktur dapat menjadi upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan diikuti dengan terciptanya lapangan kerja dan pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia periode 2011-2016 menggunakan metode analisis panel data dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur berpengaruh menurunkan kemiskinan di kedua kawasan, namun lebih besar pengaruhnya di Kawasan Barat Indonesia. Pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan akan lebih efektif jika diikuti dengan kualitas dan aksesibilitas terhadap infrastruktur tersebut.

**Kata kunci:** FEM, infrastruktur, kemiskinan

### PERNYATAAN KUNCI

- Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan di Indonesia yang jika dibiarkan akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial ekonomi.
- Infrastruktur yang berkualitas dan memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dimana akan diikuti pula oleh penciptaan lapangan kerja.
- Kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam menanggulangi

kemiskinan berbeda antar kawasan karena setiap kawasan memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan bersifat berbeda antar kawasan. Pada Kawasan Barat Indonesia dapat dilakukan kebijakan, antara lain: 1) pembangunan infrastruktur jalan lebih difokuskan pada peningkatan kualitas jalan, 2) meningkatkan penyaluran energi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik dengan skala besar guna meningkatkan produktivitas, dan 3) meningkatkan sarana

kesehatan sebagai salah satu strategi pelayanan pembangunan kesehatan.

Sementara pada Kawasan Timur Indonesia dapat dilakukan kebijakan, antara lain: 1) pembangunan infrastruktur jalan difokuskan pada penambahan panjang jalan guna memudahkan mobilitas manusia serta arus barang dan jasa, 2) peningkatan penyaluran energi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik yang dibangun dengan skala kecil dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di setiap daerah, dan 3) meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur kesehatan.

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah pengentasan kemiskinan yang dapat diatasi melalui pembangunan infrastruktur. Penelitian Yoshino dan Nakahigashi (2000) menyimpulkan bahwa infrastruktur memiliki dampak pada peningkatan kegiatan produksi yang mana akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nuraliyah (2011) juga mengatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan terciptanya lapangan kerja, artinya semakin banyaknya orang yang bekerja dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

Mengingat begitu pentingnya peran infrastruktur maka diperlukan kondisi infrastruktur yang memadai. Nugroho (2015) menyebutkan bahwa penyediaan infrastruktur harus memerhatikan baik dari

segi kuantitas maupun aksesibilitas terutama untuk masyarakat miskin. Layanan infrastruktur yang diakses oleh orang miskin dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan standar hidup orang miskin. Ketika ada peningkatan standar hidup orang miskin, akhirnya dapat menjauhkan dari kemiskinan. Dengan demikian, tujuan utama penyediaan infrastruktur yaitu untuk mengurangi kemiskinan dapat tercapai.

Peran pentingnya infrastruktur dalam pembangunan nasional membuat pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur selama kurun waktu 2011-2016 cenderung mengalami peningkatan. Fenomena ini dapat memperlihatkan mengenai kepedulian pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan infrastruktur nasional. Anggaran infrastruktur digunakan antara lain untuk mendanai proyek prioritas yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yaitu meliputi bidang jalan dan jembatan, minyak dan gas, ketenagalistrikan, pelabuhan, air dan sanitasi, transportasi perkotaan, kereta api, serta teknologi informasi. Pemerintah melalui anggaran infrastruktur berharap bahwa infrastruktur yang semakin baik akan menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan (Rejekiningrum *et al.*, 2022).

Meningkatnya anggaran infrastruktur dapat dikatakan sudah membawa manfaat yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan kemiskinan tetap saja angka kemiskinan tersebut masih relatif tinggi terutama untuk wilayah Kawasan Timur Indonesia. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan pembangunan infrastruktur di mana infrastruktur di Kawasan Barat Indonesia lebih memadai dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia.

Kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di pulau Jawa dan Kawasan Barat Indonesia menimbulkan disparitas pendapatan per kapita pada masing-masing daerah di Indonesia, terutama antara Pulau Jawa dengan luar Jawa dan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, meskipun pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi meningkat (Sibarani, 2002; Utami *et al.*, 2016).

Penelitian Maryaningsih *et al.* (2014) yang menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita riil nasional, namun belum terdapat pemerataan pendapatan per kapita riil antar provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi dengan pendapatan per kapita riil lebih rendah tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi

dengan pendapatan per kapita riil lebih tinggi. Ini dapat diartikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah belum cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan karena tidak memerhatikan besar dampak berdasarkan masing-masing wilayah.

Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh infrastruktur (jalan dan listrik) tetapi dipengaruhi pula oleh jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengangguran (Wahyuni, 2011). Penyebab dan penanggulangan kemiskinan berbeda antardaerah sehingga pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus mempertimbangkan keragaman penyebab dan karakteristik kemiskinan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia serta kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas infrastruktur dalam menurunkan kemiskinan.

## **SITUASI TERKINI**

Wilayah perekonomian Indonesia dapat dibagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Pasal 3 menyebutkan bahwa Kawasan Timur Indonesia meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan Kawasan Barat Indonesia meliputi semua provinsi lainnya yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.

### **Kondisi Infrastruktur**

Dalam penelitian ini, infrastruktur yang digunakan adalah infrastruktur jalan, listrik industri, dan puskesmas. Total panjang jalan di Indonesia pada tahun 2016 adalah 534.173 km dengan total panjang jalan di Kawasan Barat Indonesia sebesar 313.783 km atau 58,74% dan di Kawasan Timur Indonesia sebesar 220.390 km atau 41,25%. Berdasarkan kualitasnya, jalan di Indonesia masih kurang memadai karena masih banyak jalan yang rusak. Panjang jalan yang mengalami kerusakan pada tahun 2016, yaitu sebesar 92.489 km pada Kawasan Barat Indonesia dan 87.583 km pada Kawasan Timur Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian karena jalan yang rusak akan menghambat aktivitas sosial dan ekonomi penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan kualitasnya, jalan di Indonesia masih kurang memadai karena masih banyak jalan yang rusak. Panjang jalan yang mengalami kerusakan pada tahun 2016, yaitu sebesar 92.489 km pada Kawasan Barat Indonesia dan 87.583 km pada Kawasan

Timur Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian karena jalan yang rusak akan menghambat aktivitas sosial dan ekonomi penduduk di wilayah tersebut.

Infrastruktur yang kedua yaitu listrik. Total listrik terjual oleh PLN pada tahun 2016 untuk kelompok industri sebesar 65.401,79 GWh dimana dari jumlah tersebut sebesar 63.750,83 GWh atau 97,47% dikonsumsi oleh industri yang berada di Kawasan Barat Indonesia, sementara sisanya yaitu sebesar 1.650,96 GWh atau 2,52% dikonsumsi oleh industri yang berada di Kawasan Timur Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab industri di Kawasan Barat Indonesia lebih maju daripada industri di Kawasan Timur Indonesia karena listrik digunakan untuk teknologi dan mesin dalam menjalankan proses produksi.

Infrastruktur yang ketiga, yaitu infrastruktur kesehatan. Perkembangan infrastruktur kesehatan dapat dilihat dari jumlah puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas disebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Peningkatan jumlah puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk. Kawasan Barat Indonesia memiliki rasio puskesmas per 30.000 penduduk yang lebih rendah daripada Kawasan Timur Indonesia. Padahal jumlah penduduk dan kepadatan di Kawasan Barat Indonesia lebih besar dibandingkan Kawasan Timur Indonesia.

#### **Kondisi Kemiskinan**

Pada tahun 2016 persentase kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia sebesar 9,88% dan Kawasan Timur Indonesia sebesar 13,57%. Perbedaan kemiskinan antar kawasan di Indonesia dapat disebabkan salah satunya karena adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Tingkat ekonomi di Kawasan Barat Indonesia lebih tinggi daripada di Kawasan Timur Indonesia.

#### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur antara lain dengan besaran yang disebut Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah.

Struktur perekonomian Indonesia sudah mengalami transformasi dari sektor tradisional ke sektor modern. Pada struktur perekonomian Kawasan Barat Indonesia, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian, yaitu berkisar 26% selama periode 2012-2016. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menempati posisi kedua dengan besar berkisar 14-15% diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menempati posisi ketiga dengan besar berkisar 11-12%. Pada posisi keempat dan kelima ditempati oleh sektor konstruksi dan pertambangan dan penggalian dengan masing-masing berkisar 10% dan 5-6%, sementara sektor lainnya hanya berkisar antara 0,8-5%.

#### **Ketenagakerjaan**

Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja di Indonesia selama periode 2011-2016 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan proporsi jumlah tenaga kerja lebih besar dibandingkan jumlah pengangguran (BPS, 2016). Pada tahun 2011 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 107,41 juta jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 118,41 juta jiwa pada tahun 2016, sementara jumlah pengangguran sebanyak 8,68 juta jiwa di tahun 2011 dan menurun hingga mencapai 7,03 juta jiwa di tahun 2016.

Angkatan kerja baik di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah dan pendidikan di bawahnya (BPS, 2016). Sementara lulusan perguruan tinggi merupakan jumlah angkatan kerja paling sedikit. Hal ini menandakan bahwa penduduk Indonesia masih belum dapat menikmati pendidikan tinggi dan juga menggambarkan sumber daya manusia yang terserap lapangan kerja memiliki kualitas rendah.

## METODOLOGI

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 33 provinsi di Indonesia yang berada di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2011-2016. Data yang sudah diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam suatu bentuk data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan sumber data

Variabel	Keterangan	Satuan	Sumber
LnMISKIN	Jumlah penduduk miskin	Ribu jiwa	BPS
LnJLN1	Panjang jalan kondisi baik	Km	BPS
LnJLN2	Panjang jalan kondisi rusak	Km	BPS
LnLIND	Energi listrik industri	GWh	BPS
RPUS	Rasio puskesmas per 30.000 penduduk	-	
SHAREAGR	Share PDRB sektor pertanian	%	BPS
SHAREIND	Share PDRB sektor industri	%	BPS
AK1	Proporsi angkatan kerja pendidikan rendah	%	BPS
AK2	Proporsi angkatan kerja Pendidikan tinggi	%	BPS
LnUMP	Upah minimum provinsi	%	BPS
TPT	Tingkat pengangguran terbuka	%	BPS

### Spesifikasi Model

Penelitian ini mengkaji hubungan antara infrastruktur dengan kemiskinan. Model pada penelitian ini untuk Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia adalah sebagai berikut

$$\text{LnMISKIN}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LnJLN1}_{it} + \alpha_2 \text{LnJLN2}_{it} + \alpha_3 \text{LnLIND}_{it} + \alpha_4 \text{RPUS}_{it} +$$

$$\alpha_5 \text{SHAREAGR}_{it} + \alpha_6 \text{SHAREIND}_{it} + \alpha_7 \text{AK1}_{it} + \alpha_8 \text{AK2}_{it} + \alpha_9 \text{LnUMP}_{it} + \alpha_{10} \text{TPT}_{it} + \epsilon_{it}$$

Tanda yang diharapkan adalah  $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_6, \alpha_8, < 0$  dan  $\alpha_2, \alpha_5, \alpha_7, \alpha_9, \alpha_{10} > 0$  dimana:

$\alpha_0$  : *Intercept*

$\alpha_1 - \alpha_{10}$  : Parameter yang diduga

$\ln$  : Logaritma natural

MISKIN : Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)

JLN1 : Panjang jalan kondisi baik (km)

JLN2 : Panjang jalan kondisi rusak (km)

LIND : Energi listrik industri (GWh)

RPUS : Rasio puskesmas per 30,000 penduduk

SHAREAGR : Share PDRB sektor pertanian (%)

SHAREIND : Share PDRB sektor industri (%)

AK1 : Proporsi angkatan kerja pendidikan rendah (%)

AK2 : Proporsi angkatan kerja pendidikan tinggi (%)

UMP : Upah Minimum Provinsi (rupiah)

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

$i$  : Data cross section provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia

$t$  : *Time series* tahun 2011-2016

$\epsilon_{it}$  : *Error term*

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk melihat gambaran secara umum mengenai kondisi infrastruktur dan kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia selama periode penelitian.

### Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di

Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Metode analisis kuantitatif dalam penelitian ini berupa regresi data panel menggunakan *software Eviews 8*. Analisis model dengan data panel menggunakan tiga metode, yaitu *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

### Uji Asumsi Klasik

Agar model yang diestimasi hasilnya tidak bias, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antarvariabel independen (bebas) pada model regresi. Multikolinearitas muncul apabila dua atau lebih peubah bebas saling terkait satu dengan yang lainnya.

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan asumsi klasik berupa ragam sisaan yang tidak konstan. Permasalahan heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan membandingkan *sum square residual* pada *weight statistic* dengan *unweighted statistic*. Jika *sum square residual weighted statistic* lebih kecil dari *sum square residual unweighted statistic* maka dapat dikatakan adanya heteroskedastisitas. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk

mengatasi permasalahan dalam pelanggaran asumsi klasik adalah dengan metode *Generalized Least Square* (GLS).

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi yang terjadi antar observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Adanya autokorelasi dalam suatu model dapat terdeteksi dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW) *statistic* dalam model dan dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson (DW) pada tabel. Hipotesis dalam pengujian autokorelasi adalah:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat autokorelasi

H<sub>1</sub>: Terdapat autokorelasi

Selang pengujian dalam autokorelasi adalah sebagai berikut (Juanda, 2009):

$0 < DW < D_L$ : Tolak H<sub>0</sub>, ada autokorelasi positif

$D_L \leq DW \leq D_U$ : Daerah ragu-ragu, tidak ada keputusan

$D_U < DW < 4 - D_U$ : Tidak tolak H<sub>0</sub>, tidak ada autokorelasi

$4 - D_U \leq DW \leq 4 - D_L$ : Daerah ragu-ragu, tidak ada keputusan

$4 - D_L < DW < 4$ : Tolak H<sub>0</sub>, ada autokorelasi negative

### 4. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat error term

menyebar normal atau tidak. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai JarqueBera. Hipotesis dalam pengujian normalitas adalah:

H<sub>0</sub>: *Error term* terdistribusi normal

H<sub>1</sub>: *Error term* tidak terdistribusi normal

Apabila nilai probabilitas pada Jarque-Bera lebih besar dibandingkan

dengan taraf nyata sebesar 5% maka H<sub>0</sub> tidak ditolak sehingga dapat dikatakan model tersebut menyebar normal.

### Uji Kriteria Statistik

Uji kriteria statistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel yang digunakan di dalam model regresi signifikan atau tidak. Uji hipotesis ini terdiri dari uji F, uji t, dan uji R<sup>2</sup>.

#### 1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan untuk uji F sebagai berikut:

H<sub>0</sub>:  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_n = 0$

H<sub>1</sub>: Minimal ada satu  $\beta$  yang tidak sama dengan nol.

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka H<sub>0</sub> diterima dan sebaliknya. Uji signifikansi F juga dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas *Fstatistic* dengan taraf nyata. Jika probabilitas lebih kecil dari taraf nyata  $\alpha$ , maka tolak H<sub>0</sub> berarti minimal ada



satu variabel independen yang berpengaruh nyata terhadap variabel dependen pada taraf nyata  $\alpha$  persen.

## 2. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh setiap variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang digunakan untuk uji T sebagai berikut:

$$H_0: \beta_n = 0$$

$$H_1: \beta_n \neq 0$$

Apabila t hitung lebih kecil dari T tabel maka  $H_0$  diterima dan sebaliknya. Uji signifikansi t juga dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dengan nilai taraf nyata  $\alpha$  persen. Jika probabilitas lebih kecil dari taraf nyata  $\alpha$  persen, maka tolak  $H_0$  berarti variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen pada taraf nyata  $\alpha$  persen.

## 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keragaman variabel dependen. Nilai ini berkisar antara ( $0 < R^2 < 1$ ) dengan asumsi bahwa nilai yang semakin mendekati satu maka menunjukkan model yang terbentuk dapat menjelaskan keragaman dari variabel dependen dan sebaliknya.

## ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/ PENANGANAN

### Kawasan Barat Indonesia

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa variabel yang signifikan memengaruhi kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia adalah panjang jalan kondisi rusak, listrik industri, rasio puskesmas, *share* PDRB sektor pertanian, *share* PDRB sektor industri, dan upah minimum, sementara panjang jalan kondisi baik, proporsi angkatan kerja pendidikan rendah, proporsi angkatan kerja pendidikan tinggi, dan tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan.

Variabel jalan kondisi baik memiliki nilai koefisien sebesar -0,044052 namun tidak berpengaruh signifikan. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan untuk akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, informasi dan pasar. Selain itu, kondisi jalan yang baik akan membantu mobilitas perekonomian karena memudahkan perpindahan barang dari satu daerah ke daerah lain dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi meningkat yang diikuti oleh penurunan kemiskinan. Meskipun demikian, penambahan panjang jalan kondisi baik masih relatif rendah yaitu rata-rata penambahan panjang jalan kondisi baik selama kurun waktu 2011-2016 adalah sebesar 2,08% dimana lebih rendah dari rata-rata penambahan panjang jalan kondisi rusak yang sebesar 4,43%. Oleh karena itu, peningkatan panjang jalan kondisi baik justru tidak memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan kemiskinan.

Disisi lain jika kondisi jalan rusak maka akan menyebabkan mobilitas perekonomian terganggu sehingga terjadi keterlambatan pengangkutan barang. Dengan demikian, perekonomian akan berkembang lambat dan berakibat pada minimnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dan terus terjebak dalam kemiskinan. Hal ini sesuai dengan hasil estimasi bahwa jalan dengan kondisi rusak akan meningkatkan kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia. Variabel jalan kondisi rusak memiliki nilai koefisien sebesar 0,110802. Artinya, ketika terjadi peningkatan panjang jalan dengan kondisi rusak sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,110802% dengan asumsi *ceteris paribus*.

Variabel listrik industri berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Setiap peningkatan listrik industri sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,114423% dengan asumsi *ceteris paribus*. Energi listrik yang digunakan untuk kegiatan industri berperan dalam meningkatkan efisiensi biaya. Mengingat industri di Kawasan Barat Indonesia khususnya di Jawa sangat maju jelas maka efisiensi biaya sangat menguntungkan. Efisiensi biaya produksi dicapai ketika penggunaan listrik untuk teknologi dan mesin dalam proses produksi lebih efisien daripada dikerjakan manual. Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi menjadi lebih sedikit, maka perusahaan akan menetapkan harga

barang produksinya menjadi lebih murah. Harga barang yang murah akan meningkatkan daya beli masyarakat, kesejahteraan akan meningkat dan kemiskinan akan semakin turun.

Variabel rasio puskesmas memiliki nilai koefisien sebesar -0,346688. Artinya setiap peningkatan 1% rasio puskesmas akan berpengaruh menurunkan kemiskinan sebesar 0,346688% dengan asumsi *ceteris paribus*. Puskesmas menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Semakin banyaknya fasilitas puskesmas menandakan semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Kondisi masyarakat yang sehat akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Produktivitas meningkat akan menyebabkan meningkatnya peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Variabel *share* PDRB sektor pertanian berpengaruh meningkatkan kemiskinan dimana peningkatan 1% *share* PDRB sektor pertanian maka kemiskinan meningkat sebesar 0,026217% dengan asumsi *ceteris paribus*. Sektor pertanian merupakan sektor tradisional yang banyak dipengaruhi faktor alam dan tenaga kerja yang melimpah sementara lahan yang semakin sempit akibat alih fungsi lahan sehingga produktivitas sektor pertanian semakin rendah (Kaswanto *et al.*, 2021). Hal ini dapat dilihat dari laju

pertumbuhan sektor pertanian cenderung menurun sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin kecil. Akibatnya, nilai tukar petani dari tahun ke tahun cenderung menurun sehingga pendapatan riil petani semakin rendah. Pendapatan petani yang semakin rendah dapat diartikan bahwa petani semakin tidak sejahtera.

Variabel *share* PDRB sektor industri berpengaruh meningkatkan kemiskinan dimana peningkatan 1% *share* PDRB sektor industri maka meningkatkan kemiskinan sebesar 0,012705% dengan asumsi *ceteris paribus*. Sektor industri memegang peranan penting dalam perekonomian di Kawasan Barat Indonesia yang terbukti dari kontribusinya sebesar 26%. Sektor industri identik dengan penggunaan teknologi dan mesin yang dapat menggantikan tenaga manusia sehingga akan menurunkan permintaan tenaga kerja. Feldmann (2013) menyebutkan bahwa perubahan teknologi dapat meningkatkan pengangguran karena untuk meningkatkan keuntungan, perusahaan akan berinvestasi pada teknologi yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Menurut data BPS, laju peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri selama periode 2011-2016 secara perlahan mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa input kapital yang digunakan semakin padat modal.

Sektor pertanian dan sektor industri di Kawasan Barat Indonesia yang ternyata

berpengaruh meningkatkan kemiskinan juga dapat mengindikasikan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan dimana hasil dari pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri lebih banyak dinikmati oleh penduduk golongan kaya dan hanya sedikit dinikmati oleh penduduk golongan miskin. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia sebesar 0,36 yang termasuk ke dalam kategori ketimpangan sedang sehingga dapat dikatakan hasil dari pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri tidak tersebar secara merata.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah biasanya selalu diikuti dengan peningkatan arus migrasi. Penduduk miskin terutama yang masih menganggur akan melakukan migrasi ke daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan secara langsung mampu menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap semua angkatan kerja baru dari luar daerah sehingga yang akan terjadi justru meningkatnya jumlah pengangguran pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut. Menurut data BPS tahun 2015, jumlah migrasi masuk ke Kawasan Barat Indonesia sebanyak 21.459.224 jiwa. Migrasi masuk menyebabkan terjadinya persaingan di lapangan kerja sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya

disebabkan dan dirasakan oleh penduduk lokal.

Variabel proporsi angkatan kerja pendidikan rendah dapat menurunkan kemiskinan namun tidak berpengaruh signifikan. Sementara variabel proporsi angkatan kerja pendidikan tinggi dapat meningkatkan kemiskinan namun juga tidak berpengaruh signifikan. Padatnya penduduk di Kawasan Barat Indonesia menjadikan kawasan ini mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Menurut data BPS 2016, sebanyak 79,28% angkatan kerja berada di Kawasan Barat

Indonesia yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,32%. Hal inilah yang menyebabkan penambahan angkatan kerja di Kawasan Barat Indonesia tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Meskipun angkatan kerja pendidikan rendah tidak berpengaruh signifikan namun berdampak menurunkan kemiskinan karena struktur tenaga kerja di Kawasan Barat Indonesia didominasi oleh tenaga kerja pendidikan rendah yaitu lulusan menengah atas yang mencapai 33,31%, lulusan sekolah dasar sebesar 21,54 %, dan lulusan menengah pertama sebesar 17,46%. Hal ini menandakan kegiatan perekonomian di Kawasan Barat Indonesia masih mengandalkan tenaga kerja dengan pendidikan rendah sehingga kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan

rendah masih besar dan dapat menurunkan kemiskinan. Sementara tenaga kerja lulusan perguruan tinggi hanya sebesar 18,76%. Hal ini menandakan bahwa kesempatan kerja yang ada masih terbatas untuk lulusan pendidikan tinggi.

Variabel upah minimum berpengaruh secara signifikan meningkatkan kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia. Setiap kenaikan 1% upah minimum maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,066241% dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil estimasi ini juga sesuai dengan teori kekakuan upah yang menjelaskan tentang gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya akibat dari peningkatan upah minimum. Akibatnya tercipta *excess supply* tenaga kerja yang menyebabkan timbulnya pengangguran yang pada akhirnya akan menambah jumlah kemiskinan.

Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh meningkatkan kemiskinan namun tidak signifikan. Tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Barat Indonesia sangat tinggi namun tingginya pengangguran ini juga disebabkan oleh adanya arus migrasi. Mereka yang melakukan migrasi memiliki harapan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Menurut Nabila dan Pardede (2014), orang miskin cenderung melakukan migrasi ke perkotaan dan mereka yang melakukan migrasi ke perkotaan adalah yang menerima

bantuan berupa uang, beras dan makanan lainnya. Bantuan tersebut dijadikan sebagai sesuatu yang dapat menyokong ekonomi mereka sehingga mereka memiliki modal untuk melakukan migrasi dan meskipun belum memiliki pekerjaan namun tidak dapat dikatakan sebagai penduduk miskin yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup layak.

### **Kawasan Timur Indonesia**

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa variabel yang signifikan memengaruhi kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia adalah panjang jalan kondisi rusak, listrik industri, proporsi angkatan kerja pendidikan rendah, proporsi angkatan kerja pendidikan tinggi, *share* PDRB sektor industri, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka, sementara panjang jalan kondisi baik, rasio puskesmas, dan *share* PDRB sektor pertanian tidak signifikan.

Variabel jalan kondisi baik memiliki nilai koefisien sebesar -0,071153 namun tidak berpengaruh signifikan. Artinya peningkatan panjang jalan kondisi baik justru tidak memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan kemiskinan. Sama seperti kondisi Kawasan Barat Indonesia, penambahan panjang jalan kondisi baik di Kawasan Timur Indonesia juga tergolong rendah. Selama kurun waktu 2011-2016 rata-rata penambahan jalan kondisi baik hanya sebesar 1,64% sehingga pengaruhnya tidak terlalu signifikan.

Variabel jalan kondisi rusak berpengaruh menurunkan kemiskinan dimana peningkatan 1% panjang jalan kondisi rusak maka menurunkan kemiskinan sebesar 0,056431% dengan asumsi *ceteris paribus*. Meskipun jalan rusak akan menghambat mobilitas perekonomian namun karena panjang jalan kondisi rusak di Kawasan Timur Indonesia mencapai 40%, maka keberadaan jalan kondisi rusak tersebut masih dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, jumlah kendaraan bermotor Kawasan Timur Indonesia yang lebih sedikit daripada di Kawasan Barat Indonesia sehingga bertambahnya panjang jalan dengan kondisi rusak tidak terlalu berpengaruh mengganggu mobilitas. Hal ini juga mengindikasikan bahwa di Kawasan Timur Indonesia penambahan panjang jalan lebih dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang masih belum berkembang secara maksimal.

Variabel listrik industri memiliki nilai koefisien sebesar -0,008863. Artinya, ketika terjadi peningkatan listrik industri sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,008863% dengan asumsi *ceteris paribus*. Sektor industri di Kawasan Indonesia Timur sedang berkembang pesat sehingga dibutuhkan energi listrik yang merupakan akses terhadap teknologi dan mesin yang dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan efisiensi biaya.

Variabel rasio puskesmas berpengaruh meningkatkan kemiskinan namun tidak signifikan. Hal ini diduga karena angka rasio puskesmas belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Misalnya daerah Papua, Papua Barat, dan Maluku yang memiliki nilai rasio puskesmas sangat tinggi karena jumlah penduduk yang relatif sedikit namun tersebar dalam wilayah yang luas. Selain itu, angka harapan hidup di Kawasan Timur Indonesia lebih rendah dari Kawasan Barat Indonesia, yaitu sebesar 67,87 tahun. Angka harapan hidup ini mencerminkan derajat kesehatan di suatu wilayah. Dengan demikian, penduduk Kawasan Timur Indonesia memiliki kesadaran dan kemampuan hidup sehat yang masih rendah akibat sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan tersebut.

Variabel *share* PDRB sektor pertanian berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar -0,001313. Artinya peningkatan *share* PDRB sektor pertanian tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kemiskinan. Hal ini sangat disayangkan mengingat sektor pertanian masih menjadi sektor andalan kegiatan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia. Ditambah Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas wilayah mencapai 61,3% dari luas wilayah nasional tentu lahan pertanian masih terbentang luas sehingga sektor

pertanian masih dapat berkembang luas. Dengan demikian kesempatan kerja di sektor pertanian masih terbuka lebar dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang kemudian akan meningkatkan pendapatan maka kemiskinan menurun.

Variabel *share* PDRB sektor industri berpengaruh menurunkan kemiskinan dimana peningkatan 1% *share* PDRB sektor industri maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,026656% dengan asumsi *ceteris paribus*. Menurut teori Lewis bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri. Industrialisasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkat akan diikuti dengan perluasan lapangan kerja sehingga kesempatan kerja meningkat dan pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan. Pada Kawasan Timur Indonesia, sektor industri mulai berkembang pesat yang ditandai dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2011-2016 sebesar 5,44%.

Variabel proporsi angkatan kerja pendidikan rendah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar -0,006722. Artinya, ketika terjadi peningkatan angkatan kerja pendidikan rendah sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,006722% dengan asumsi *ceteris paribus*. Kegiatan

perekonomian di Kawasan Timur Indonesia masih mengandalkan tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Menurut data BPS tahun 2016, tenaga kerja yang mendominasi di Kawasan Timur Indonesia adalah lulusan menengah atas yang mencapai 32,94%, lulusan sekolah dasar sebesar 16,67%, dan lulusan menengah pertama sebesar 13,19%. Selain itu, sektor pertanian masih menjadi sektor yang mendominasi kegiatan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia. Sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah karena untuk bekerja pada sektor pertanian tidak membutuhkan sertifikasi secara resmi yang menunjukkan keahlian. Menurut data BPS tahun 2016, sekitar 68,73% yang bekerja di sektor pertanian merupakan lulusan SD, SMP, dan SMA. Dengan demikian penambahan angkatan kerja menandakan semakin banyak pasokan tenaga kerja dan akan meningkatkan jumlah output.

Variabel proporsi angkatan kerja pendidikan tinggi berpengaruh signifikan menurunkan kemiskinan artinya dengan meningkatnya angkatan kerja pendidikan tinggi sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,007864% dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini menandakan bahwa peningkatan angkatan kerja pendidikan tinggi diikuti pula dengan peningkatan lapangan kerja bagi pendidikan tinggi sehingga dapat memberikan pendapatan yang layak. Menurut Todaro dan

Smith (2006), seseorang yang lebih memilih untuk berinvestasi dalam pendidikan maka akan berdampak pada pendapatannya di masa depan. Tingkat pendidikan berimplikasi pada tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan akan memengaruhi produktivitas melalui proses produksi yang lebih efisien. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan upah yang lebih tinggi. Upah yang tinggi akan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

Variabel upah minimum memiliki nilai koefisien sebesar 0,069089. Hal ini memiliki arti setiap peningkatan 1% upah minimum maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,069089% dengan asumsi *ceteris paribus*. Kebijakan upah minimum diterapkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Namun, kebijakan upah minimum tidak mampu untuk menurunkan kemiskinan karena semakin tinggi upah minimum maka permintaan terhadap tenaga kerja semakin menurun. Peningkatan upah minimum menyebabkan biaya produksi perusahaan meningkat sehingga perusahaan akan melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja untuk mempertahankan keuntungannya. Pengurangan tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan jumlah

pengangguran yang pada akhirnya akan menambah jumlah kemiskinan.

Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 0,015262. Artinya, ketika terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,015262% dengan asumsi *ceteris paribus*. Pengangguran menyebabkan hilangnya kesempatan seseorang dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan memadai. Tidak memiliki pendapatan atau pendapatan yang diterima rendah akan menyebabkan beban yang ditanggung lebih besar sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi dan pendidikan. Akibatnya mereka akan memiliki pendidikan rendah sehingga mengalami kesulitan bersaing di dunia kerja pada masa yang akan datang. Pada akhirnya, mereka akan bekerja dengan gaji rendah sehingga lingkaran kemiskinan sulit untuk diputuskan.

### **Pembahasan**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan di Indonesia yang jika dibiarkan akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial ekonomi. Kemiskinan memiliki berbagai penyebab dan dampak yang berbeda antarwilayah. Sering kali bahwa kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar merupakan faktor yang berkontribusi menyebabkan kemiskinan.

Kurangnya akses terhadap pasar, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja akan mengurangi peluang terhadap pendapatan sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai akses tersebut.

Pembangunan infrastruktur penting untuk pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ekonomi (jalan dan listrik) berpengaruh secara langsung terhadap proses produksi dan atau distribusi sehingga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Infrastruktur jalan yang baik akan mengurangi biaya transportasi dan distribusi barang akan semakin lancar.

Listrik akan sangat berpengaruh pada lancarnya proses produksi. Sedangkan infrastruktur sosial (puskesmas) tidak berpengaruh langsung terhadap proses produksi. Infrastruktur ini berpengaruh terhadap tingginya modal manusia dalam hal kualitas dan membantu meningkatkan produktivitas pekerja sehingga pada akhirnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan antara kedua kawasan. Pada Kawasan Barat Indonesia pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya fokus terhadap penambahan panjang jalan melainkan harus



lebih memperhatikan kualitas jalan tersebut agar dapat menurunkan kemiskinan. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi di Kawasan Barat Indonesia yang sangat tinggi sehingga penambahan panjang jalan yang diikuti dengan kualitas jalan yang baik akan mendorong perekonomian Kawasan Barat Indonesia tumbuh lebih efektif dan efisien. Sementara pada Kawasan Timur Indonesia, pembangunan jalan lebih difokuskan pada penambahan panjang jalan tanpa perlu memerhatikan kualitas. Ketersediaan jalan akan meningkatkan ekonomi Kawasan Timur Indonesia yang masih memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan sehingga nantinya akan menurunkan kemiskinan.

Infrastruktur listrik industri mampu menurunkan kemiskinan di kedua kawasan namun pengaruhnya lebih besar di Kawasan Barat Indonesia. Sektor industri di kedua kawasan masih menjadi sektor unggulan, namun kondisi sektor industri di Kawasan Barat Indonesia yang lebih besar daripada

Kawasan Timur Indonesia maka listrik industri akan lebih mendukung efisiensi kegiatan produksi industri pada Kawasan Barat Indonesia.

Selanjutnya, infrastruktur kesehatan yaitu puskesmas lebih efektif berpengaruh menurunkan kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia daripada di Kawasan Timur Indonesia. Puskesmas dapat menurunkan kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia karena kepadatan penduduk yang sangat tinggi (Tabel 2) sehingga keberadaan puskesmas dimanfaatkan secara efektif sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sementara di Kawasan Timur Indonesia yang sangat luas sementara jumlah penduduk sedikit (Tabel 2) menyebabkan puskesmas terletak jauh dari jangkauan penduduk sehingga puskesmas masih belum dimanfaatkan secara efektif. Oleh karena itu, puskesmas belum mampu menurunkan kemiskinan karena aksesibilitas penduduk yang masih rendah.

Tabel 2. Luas areal (km<sup>2</sup>), jumlah penduduk (ribu jiwa), dan kepadatan penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>) tahun

Wilayah	Luas area		Jumlah penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
	km <sup>2</sup>	%	Ribu jiwa	%	
Barat	616.011,62	33,51	206.994,56	80,01	1361,97
Timur	1.222.099,36	66,49	51.712,00	19,99	80,78
Indonesia	1.838.110,98	100	258.706,56	100,00	740,79

Sumber: BPS 2016 (diolah)

Infrastruktur yang berkualitas dan memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta akan diikuti pula oleh penciptaan lapangan kerja. Sektor pertanian dan sektor industri masih menjadi sektor andalan di kedua kawasan menyebabkan ketergantungan dalam penciptaan kesempatan kerja. Namun untuk Kawasan Barat Indonesia, pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri tidak mampu menurunkan kemiskinan. Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi dan mesin yang

dapat menyebabkan pengalihan fungsi tenaga kerja menjadi mesin, tingkat ketimpangan pendapatan relatif tinggi, dan masalah migrasi (Tabel 3) yang masuk sangat besar sehingga persaingan lapangan kerja meningkat. Sementara di Kawasan Timur Indonesia sektor pertanian masih menjadi andalan karena potensi alam yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal serta sektor industri yang masih berkembang pesat sehingga lapangan kerja masih dapat terbuka lebar.

Tabel 3. Jumlah migrasi masuk (jiwa) tahun 2000-2015

Wilayah	Tahun			
	2000	2005	2010	2015
Barat	16.558.657	17.035.125	22.434.785	21.459.224
Timur	3.897.826	4.241.804	5.540.827	5.438.363

Sumber: BPS 2016 (diolah)

Selain infrastruktur, ketersediaan angkatan kerja juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga produktif dan akan lebih efektif jika didukung kualitas dan keterampilan yang tinggi. Kualitas dan keterampilan dapat dilihat dari tingkat pendidikan angkatan kerja tersebut. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa angkatan kerja baik pendidikan rendah maupun pendidikan tinggi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia karena jumlah angkatan kerja yang sangat tinggi sehingga sulit menyeimbangkan antara pertumbuhan

angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja meskipun perekonomian tumbuh sangat tinggi. Sementara di Kawasan Timur Indonesia angkatan kerja baik pendidikan rendah dan pendidikan tinggi berpengaruh menurunkan kemiskinan. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja untuk kedua jenjang pendidikan.

Ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan penawaran tenaga kerja mengakibatkan masalah pengangguran. Selain itu, kebijakan upah minimum juga menjadi penyebab pengangguran. Upah minimum yang meningkat setiap tahun

menyebabkan bertambahnya biaya produksi yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar sehingga perusahaan akan mengambil keputusan berupa pengurangan tenaga kerja untuk mempertahankan keuntungan. Pengurangan tenaga kerja menyebabkan masalah pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat mengakibatkan kemiskinan meningkat karena para pengangguran tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan kebijakan yang lebih tepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta penetapan kebijakan upah minimum harus berhati-hati agar tidak merugikan perusahaan maupun buruh.

Dengan demikian, kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan berbeda antar kawasan karena setiap kawasan memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda. Pada Kawasan Barat Indonesia kebijakan lebih diutamakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja, sementara di Kawasan Timur Indonesia kebijakan lebih diutamakan pada peningkatan aksesibilitas penduduk melalui penambahan infrastruktur seperti panjang jalan.

## REFERENSI

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2015. BPS pusat.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2016. Jakarta (ID): BPS pusat.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Jakarta (ID): BPS pusat.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Indonesia 2016. Jakarta (ID): BPS pusat.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Listrik 2016. Jakarta (ID): BPS pusat.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Transportasi 2015. Jakarta (ID): BPS pusat.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Transportasi 2016. Jakarta (ID): BPS pusat.

Feldmann, H. 2013. Technological unemployment in industrial countries. *Journal Of Evolutionary Economics*, 23 (5), 1099–1126.

Juanda, B. 2009. *Ekonometrika: Permodelan dan Pendugaan*. Bogor: IPB Press.

Kaswanto, R. L. 2009. Alat Metode dan Pendekatan Analisis Lanskap Agroforestri. Dalam: Arifin, H.S. et. al. Analisis Lanskap Agroforestri: Konsep, Metode dan Pengelolaan Agroforestri Skala Lanskap. Bogor: IPB Press.

- Kaswanto, R.L., Aurora, R.M., Yusri, D., Sjaif, S., Barus, S. 2021. Kesesuaian lahan untuk komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(2), 189-205.
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., Savitri, M. 2014. Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17 (1), 61-98.
- Nabila, A., Pardede, E.L. 2014. Pengaruh kemiskinan terhadap migrasi di Indonesia: Analisis data SAKERTI tahun 2000 dan 2007. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14 (2), 168-187.
- Nugroho, S. S. 2015. The Roles of basic infrastructure on poverty alleviation in Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 19 (1), 1-96.
- Nuraliyah. 2011. Peran Pengembangan infrastruktur dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia: Jawa dan Luar Jawa. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Rejekiningrum, P., Kartiwa, B. 2022. Kontribusi pembangunan infrastruktur panen air terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 9(1), 37-51.
- Sibarani, H. 2002. Kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (26 Provinsi di Indonesia Tahun 1983-1997). *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Todaro, M.P., Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Utami, F.N.H., Kaswanto, R.L. 2016. The disparity of watershed development between northern and southern region of Java Island. *Procedia Environmental Sciences*, 33, 21-26.
- Wahyuni, S. 2011. Kemiskinan dan kebijakan penanggulangannya di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Yoshino, N., Nakahigashi, M. 2000. The Role of Infrastructure in Economic Development. Tersedia pada: <http://fs0.econ.mita.keio.ac.jp/staff/dikamiya/pdf00/seminar/1205.pdf>.